



DPRD KABUPATEN SLEMAN SUARA WAKIL RAKYAT

Jl. Parasamya, Tridadi, Sleman, DIY Kode Pos 55511. Telp. (0274)868413, Fax (0274)868413

KINERJA KOMISI A DPRD KABUPATEN SLEMAN

Pengawasan Terhadap Penggunaan Tanah Kas Desa



KR-Saifullah Nur Ichwan
Hasto Karyantoro SIP

SLEMAN (KR) - Kasus penyalahgunaan tanah kas desa sekarang ini mulai marak di wilayah Kabupaten Sleman. Untuk itu pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa lebih ditingkatkan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya kerugian negara maupun kerugian masyarakat yang berinvestasi di tanah kas desa. Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Sleman Hasto Karyantoro SIP mengatakan, tanah kas desa itu merupakan

aset negara, dalam hal ini milik Pemda DIY. Secara prosedur, jika ingin menggunakan tanah kas desa, harus mengajukan izin ke Gubernur DIY. "Memang kewenangan memberikan izin penggunaan dan pemanfaatan tanah kas desa itu di Gubernur DIY. Sedangkan kabupaten hanya meneruskan saja atas pengajuan izin dari kalurahan," kata Hasto, Kamis (18/5). Namun dengan maraknya penyalahgunaan tanah kas desa di wilayah Kabupaten Sleman ini cukup menyita perhatian dari Komisi A DPRD Kabupaten Sleman. Bagaimana tidak, kasus yang tengah ditangani aparat penegak hukum ini merugikan negara. Bahkan masyarakat juga mengalami kerugian miliaran rupiah. "Ini menjadi perhatian serius kami karena penyalahgunaan tanah kas desa berada di Kabupaten Sleman. Apalagi selain ada kerugian negara, juga merugikan ma-

sarakat," ujarnya. Untuk itu, Komisi A meminta kepada eksekutif agar lebih meningkatkan pengawasannya terhadap tanah kas desa yang digunakan tanpa izin. Hal itu sebagai bentuk antisipasi penyalahgunaan dan kerugian yang dialami masyarakat. "Eksekutif pasti tahu dong, tanah kas desa mana saja yang sudah berizin dan belum. Soalnya setiap ada yang mengajukan maupun

izin yang sudah terbit, eksekutif akan mendapat tembusan dari Pemda DIY sehingga bisa dijadikan untuk melakukan pengawasan," pinta Hasto, politisi dari PKS. Jika memang ditemukan penyalahgunaan, eksekutif bisa berkoordinasi dengan Pemda DIY. Sehingga ketika ada pernyataan dari masyarakat, tidak saling lempar. "Meskipun kewenangan penuh ada di Pemda DIY, tapi

aneh kalau ada di depan mata kok pemkab tidak berbuat apa-apa. Meskipun hanya sekedar koordinasi dengan Pemda. Supaya kalau ada pertanyaan dari masyarakat, kita bisa menjawab bukan lempar sana lempar sini," tegasnya. Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi A lainnya Tri Mulia Wijayanti SSt. Menurutnya, pengawasan dari Pemerintah Kabupaten itu cukup

penting. Hal itu untuk memastikan apakah penggunaan tanah kas desa menyalahi aturan atau tidak. "Dengan adanya kejadian penyalahgunaan tanah kas desa, seharusnya menjadi introspeksi bersama. Bagaimana kita terus meningkatkan pengawasannya sesuai dengan tupoksinya masing-masing," katanya. Pengawasan itu juga untuk memastikan, bahwa pemanfaatan tanah yang sudah mendapat izin dari Gubernur DIY sudah sesuai dengan peruntukannya atau belum. Jangan sampai, izin dari Gubernur DIY sudah turun, namun peruntukannya berbeda. "Misalnya, izin penggunaan tanah kas desa itu untuk usaha tertentu. Namun kenyataannya digunakan untuk lain. Makanya disinilah perlunya pengawasan dari semua lini," ucap politisi dari Fraksi Gerindra ini. Selain itu, komunikasi antara Pemda DIY dan Pemkab Sleman sebaiknya ditingkat-



KR-Saifullah Nur Ichwan
Tri Mulia Wijayanti SSt.

kan kembali. Khususnya dalam pengawasan penggunaan tanah kas desa. Supaya jika terjadi penyimpangan tanah kas desa bisa segera ditangani. "Kami rasa komunikasi itu penting. Jangan sampai kabupaten tutup mata terhadap penyimpangan tanah kas desa karena menganggap itu kewenangan Pemda DIY. Tapi perlu bergerak bersama supaya negara dan masyarakat tidak dirugikan," pinta-



KR-Saifullah Nur Ichwan
Komisi A saat menerima audiensi masyarakat yang mengalami kerugian dampak penyalahgunaan tanah kas desa.

RSU SAKINA IDAMAN DILENGKAPI GERIATRIC CENTER

Penanganan Pasien Lansia Butuh Perhatian Khusus



KR-Hasto Sutadi
GKR Hemas didampingi Bupati Kustini dan pendiri RSU Sakina Idaman Hj Sri Muslimatun meninjau fasilitas pelayanan untuk lansia.

SLEMAN (KR) - RSU Sakina Idaman di Blunyahgede Sinduadi Mlati telah menyelesaikan pembangunan Gedung Gambah yang merupakan Geriatric Center dan Rehabilitasi Medik. Peresmian

dilakukan GKR Hemas didampingi Bupati Sleman Kustini, Kamis (18/5). GKR Hemas menyampaikan apresiasi atas pembangunan Gedung Gambah. Layanan itu menjadi impian bagi para lansia,

mengingat penanganan pada lansia membutuhkan penanganan khusus yang berbeda dengan anak muda. Sehingga diperlukan dokter spesialis yang bisa menangani lansia dengan baik.

"Penanganan terhadap pasien lansia memang perlu perhatian khusus. Seperti yang saya alami sendiri, berbagai keluhan kesehatan yang timbul memang berbeda dengan anak muda atau yang paruh baya. Apalagi kalau lansia diperiksa, pasti senang cerita dengan dokternya, itu biasa dilakukan lansia," ujar GKR Hemas. Senada, Bupati Kustini ikut memberikan dukungan terhadap lahirnya Gedung Gambah. RSU Sakina Idaman diharapkan dapat terus memberikan kontribusi bagi masyarakat Sleman dalam mengakses fasilitas kesehatan yang berkualitas dan terjangkau. "Kami berharap, keberadaan RSU Sakina Idaman dapat menjadi mitra Kabupaten Sleman dalam upaya peningkatan

derajat kesehatan masyarakat," katanya. Sementara Direktur RSU Sakina Idaman Dr Nur Muhammad Artha MSc MKes SpA didampingi pendiri RSU Sakina Idaman Hj Sri Muslimatun mengungkapkan, pembangunan Gedung Gambah dilatarbelakangi tingginya jumlah lansia di DIY. Sehingga keberadaan Gedung Gambah dapat menjadi pusat layanan kese-

hatan yang meningkatkan kesehatan lansia. "Gedung yang dibangun di atas lahan seluas 1.800 meter persegi itu, tak hanya dilengkapi dengan fasilitas terapi gym untuk lansia, namun juga terdapat fasilitas sensori integrasi, dan terapi wicara untuk anak. Dengan fasilitas tersebut, diharapkan manfaat yang diberikan dari Gedung Gambah dapat dirasakan lebih luas

bagi lansia, ibu, maupun anak-anak," tuturnya. Artha menambahkan, RSU Sakina Idaman juga memberikan layanan komprehensif, salah satunya dengan pelayanan homecare dan menyediakan antar jemput gratis. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan perhatian kepada lansia sekaligus meningkatkan kesejahteraan batin lansia. (Has)-f

3 DOSEN DAN 6 MAHASISWA UAD Ikuti Program GGP-British Council



KR-Jayadi Kastari
Pelepasan dosen dan mahasiswa Program Going Global Partnerships.

BANTUL (KR) - Universitas Ahmad Dahlan (UAD) melepas 3 dosen dan 6 mahasiswa untuk mengikuti Program Going Global Partnership (GGP) dari British Council di Kampus Utama UAD Ringroad Selatan Bantul, Rabu (17/5). Ketiga dosen itu Ega Anastasia Maharani MPsi (dosen Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini/PG-PAUD), Nurul Hidayati Rofiah MPdI PhD (dosen Pendidikan Guru Sekolah Dasar/PGSD), Intan Puspitasari SPsi MA (dosen PG-PAUD). Keenam mahasiswa dari PG-PAUD dan PGSD yakni Imamiatul Azizah, Putri Sabrina UH, Najwa Kamila, Ade Berliana Putri, Diah Sintia Sri H dan Dwiky Dharma Panjaitan. Pelepasan diselenggarakan Kantor Kerjasama dan Urusan Internasional (KKUI), Bidang Kerjasama Luar Negeri. "Kegiatan GGP akan berlangsung selama 10 hari sejak 19 Mei hingga 29 Mei di Inggris," jelas Kepala KKUI Bidang Kerjasama Luar Negeri UAD, Ida Puspita MAREs, Rabu (17/5).

Menurut Ida Puspita, UAD mendapatkan hibah internasional ke-6 menyusul beberapa hibah internasional lain sebelumnya dari Uni Eropa yakni Erasmus+ bekerjasama dengan University of Gloucestershire (UoG) UK. (Jay)-f

Busana Kebaya Perlu Dilestarikan

BANTUL (KR) - Komunitas Kain dan Kebaya Indonesia (KKI) merupakan salah satu upaya pelestarian busana tradisional yang pernah ditetapkan sebagai busana nasional. Mengingat sekarang pemakaian busana kebaya sering menyimpang dari pakem, maka perlu adanya upaya pelurusan atau edukasi, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Ungkapan tersebut disampaikan Ketua DPC KKI Bantul Siti Haida Hutagaol pada acara Syawalan 1444 H PDD KKI DIY di Tembi Timbulharjo Sewon Bantul, Kamis (18/5). Untuk tahun 2023 ini DPC KKI Bantul ketempatan sebagai ajang silaturahmi dan Syawalan 1444 H DPD KKI DIY. Menurut Siti, dibentuknya KKI di DIY baru sekitar 4 tahun yang jumlah anggotanya 130 orang lebih, terdiri dari DPC Kota Yogyakarta, Bantul, Sleman dan Kulonprogo. Sedangkan Gunungkidul saat ini belum terbentuk. Sementara Ketua DPD KKI DIY Mg Itut Widyastuti SPd, menyayangkan banyak generasi muda yang kurang berminat memakai busana kebaya. Padahal kebaya merupakan busana asli budaya sendiri. (Jdm)-f



KR-Judiman
DPD KKI DIY gelar Syawalan di Tembi Bantul.

Garasimu butuh bintang baru.
Miliki STARGAZER sekarang.

Kunjungi booth Hyundai di Atrium Utama, Ambarukmo Plaza, 17 - 21 Mei 2023, dan dapatkan penawaran menarik.

Bawa pulang STARGAZER dengan Trade In benefit mulai dari: **15 Juta***

*Syarat & ketentuan berlaku.

Kini STARGAZER hadir untuk menunjang bisnis Anda melalui trim **Active baru** dengan penambahan fitur yang memberikan kenyamanan lebih untuk aktivitas sehari-hari.

STARGAZER Active New
Kini dilengkapi dengan:

- New! 16" Alloy Wheel
- New! A/C Double Blower

Scan di sini, untuk informasi lebih lanjut.

HYUNDAI

Hyundai Adisucipto, Jl. Laksda Adisucipto Km. 9, Maguwoharjo, Yogyakarta - 0274 484104
Hyundai Mlati, Jl. Magelang Km 5.7, Sinduadi, Sleman, Yogyakarta - 0274 563356
Call Center: 0 800 1 878 878 (24 Jam & Bebas Pulsa) | www.hyundai.com | Hyundai Motors Indonesia | @HyundaiMotorsIndonesia | Hyundai Motors Indonesia | #HyundaiMotorid